

Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Keluarga

Oleh:

¹Hubertus Oja; ²Jeni Awengsi Miyani Seintia The, ³Frederikus Antonius Mana

¹²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus Merauke

Email. jeniseintiathe1317@gmail.com

Abstrak

PKK merupakan gerakan pemberdayaan yang berupaya untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga di Kampung Kuler. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKK di Kampung Kuler terkait program keterampilan berupa pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif namun belum maksimal dikarenakan rendahnya kesadaran, tanggung jawab serta komitmen untuk terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, inisiatif dan kerjasama melanjutkan sendiri maupun bersama-sama masih rendah, pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah kampung belum ada, selain itu juga adanya kesulitan memasarkan usaha keterampilan, akses jalan dan jaringan komunikasi belum mendukung serta belum ada kehadiran koperasi. Maka dapat dilihat dari indikator evaluasi proses dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum semua kaum ibu terlibat, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah kampung dilakukan hanya selama waktu pelatihan berlangsung. Pada indikator evaluasi manfaat, sudah memberikan penghasilan juga dapat menambah pengetahuan serta keterampilan, tetapi belum semua kaum ibu merasakannya. Kemudian indikator evaluasi akibat, kaum ibu kini bisa membantu suami mencari nafkah, tidak terus berharap pada bantuan orang terdekat untuk memenuhi kebutuhan, memiliki pengetahuan dan keterampilan juga memiliki penghasilan sendiri meskipun hanya memenuhi kebutuhan pokok tetapi belum semua mengalaminya.

Kata Kunci: Evaluasi Program; Evaluasi Proses, Evaluasi Manfaat, Evaluasi Akibat

Abstract

PKK is an empowerment movement that seeks for the economic independence of the community. The purpose of this study is to determine the Family Empowerment and Welfare program in realizing family economic independence in Kampung Kuler. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the PKK program in Kampung Kuler related to the skills program in the form of training that was carried out was effective but not optimal due to low awareness, responsibility and commitment to be involved in planning and implementing activities, initiatives and cooperation to continue alone and together is still low, continuous assistance from the village government does not yet exist, besides that there are also difficulties in marketing skill businesses, road access and communication networks have not been supported and there is no cooperative presence. So it can be seen from the indicators of process evaluation in planning and implementing activities not all mothers are involved, assistance and supervision from the village government are carried out only during the training period. In the benefit evaluation indicator, already providing income can also increase knowledge and skills, but not all mothers feel it. Then the consequence evaluation indicators, mothers can now help their husbands make a living, do not continue to hope for the help of the closest people to meet their needs, have knowledge and skills also have their own income even though they only meet basic needs but have not all experienced it..

Keywords: Program Evaluation; Process Evaluation; Outcome Evaluation; Impact Evaluation

PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu dengan dibentuknya suatu organisasi gerakan pemberdayaan masyarakat yang resmi serta telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK. Anonim (Ansari dkk, 2018) mendefinisikan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), adalah tindakan atau gerakan pembangunan nasional dalam masyarakat yang lahir serta pengelolaannya dari rakyat, oleh rakyat juga untuk rakyat dengan kaum perempuan sebagai penggerak utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera, bahagia, mandiri dan maju. Kemudian Moedjanto dalam (Hanis dan Marzaman, 2019) juga menekankan bahwa kehadiran PKK dapat meningkatkan kualitas perempuan melalui program mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan itu sendiri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pasal 1 disebutkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, Jenoardi Meler, dkk, (2022). Mengacu pada kedua peraturan baik Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia keberadaan PKK merupakan sebuah gerakan sosial yang secara nasional yang mengandung prinsip gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, artinya gerakan ini merupakan gerakan kolektif yang menghasilkan ide, serta gagasan secara kolektif untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan bagi masyarakat.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kampung Kuler sebagai petani-nelayan dan masih adanya aktivitas berburu. Dalam pemanfaatan hasil di darat maupun laut yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak digunakan untuk konsumsi sehari-hari dari pada memanfaatkannya dengan cara menjual agar mendatangkan pemasukan. Dari cara pemanfaatan hasil alam di darat maupun laut yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan masih kesulitan karena penghasilan yang diperoleh belum sepenuhnya membantu. Selain hasil yang diperoleh dari bertani, nelayan serta berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan juga terkadang masih membutuhkan bantuan atau pemberian dari orang terdekat. Oleh sebab itu dapat dikatakan masyarakat Kampung Kuler belum mandiri secara ekonomi karena suatu keadaan dimana seseorang dinyatakan telah mandiri ketika tidak lagi bergantung pada orang lain, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bahara (Armandika, 2017) bahwa kemandirian memiliki arti suatu hal atau kondisi seseorang yang mampu berdiri sendiri dengan tidak bersandar pada orang lain. Kemudian dijelaskan juga bahwa kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai

satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan, Pusposari dkk, (2015).

Keadaan yang dialami masyarakat Kampung Kuler ini disebabkan karena peran suami sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah masih sangat dominan sehingga penghasilan yang diperoleh tidak cukup memenuhi kebutuhan yang ada, selain itu juga rendahnya pengetahuan dan keterampilan kaum ibu yang dapat diusahakan untuk mendatangkan penghasilan sehingga tidak lagi sumber penghasilan dalam keluarga hanya berasal dari suami untuk penunjang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Maka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat mewujudkan keluarga yang mandiri supaya berbagai kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi perlu adanya dukungan perempuan yakni kaum ibu untuk membantu suami sebagai pencari nafkah, karena peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga selain sebagai ibu rumah tangga tetapi juga pencari nafkah tambahan. Dalam mewujudkan hal tersebut pada tahun 2017 dibentuknya PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Kampung Kuler.

Pada Hasil Rakernas PKK ke VIII tahun 2015 dalam buku panduan PKK mengenai rencana kerja lima tahun PKK 2015 hingga 2020 yaitu adanya upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pemberian keterampilan (Tim Penggerak PKK Pusat, 2015). Dengan melihat kendala yang ada pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka untuk mengatasinya berbagai kegiatan pelatihan keterampilan telah dilaksanakan PKK Kampung Kuler dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun dalam kampung untuk memberikan pelatihan guna menambah pengetahuan dan keterampilan juga dapat memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga selain penghasilan yang berasal dari suami sehingga adanya peningkatan ekonomi serta kemandirian ekonomi dalam keluarga dapat terwujud.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu gerakan pemberdayaan yang berupaya untuk memandirikan masyarakat dimana yang berperan adalah perempuan dalam hal ini kaum ibu sebagai motor penggerak, dan pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 juga termuat di dalamnya salah satu tujuan utama PKK yaitu untuk mewujudkan keluarga yang mandiri. Dalam mewujudkan keluarga yang mandiri terutama dalam segi ekonomi dapat terlaksana melalui program keterampilan yang terdapat pada pokja II PKK, dimana program keterampilan ini sebagai upaya dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu dilakukannya penelitian di Kampung Kuler terkait evaluasi pada program PKK dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga karena PKK Kampung Kuler telah melaksanakan berbagai macam program keterampilan berupa pelatihan.

Sri Devfa 1, Nellis Mardhiah. (2022). Menegasakan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk saat ini menjadi fokus perhatian dalam melakukan pembangunan nasional di Indonesia dari waktu ke waktu, pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat sendiri. Kegiatan pemberdayaan ini bisa dilakukan jika masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan sosial yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan (Sunaryo, 2020) bahwa peningkatan kualitas SDM yang merupakan salah satu sasaran dalam objek pembangunan. Sehingga dengan hal

ini diperlukan usaha untuk mewujudkan pembangunan diberbagai bidang yang saling berkesinambungan

Dalam penyelenggaraannya program keterampilan PKK Kampung Kuler dalam bentuk pelatihan telah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai kendala diantaranya keterlibatan kaum ibu dalam penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan masih rendah sehingga belum semua terlibat, kurangnya inisiatif dan kerjasama dalam melanjutkan sendiri maupun secara bersama-sama keterampilan yang telah diperoleh, belum ada pengawasan maupun pendampingan yang rutin berkelanjutan dari pemerintah kampung setelah pelatihan selesai. Selain itu juga adanya kesulitan dalam melanjutkan usaha keterampilan yang dilakukan supaya dapat terus mendatangkan penghasilan bagi kaum ibu diantaranya masih terkendala pada kondisi jalan dan jaringan komunikasi yang belum memadai, belum ada kehadiran koperasi yang dapat menunjang keberlanjutan usaha serta belum ada tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah kampung, maupun pusat dalam hal ini yaitu kabupaten dalam membantu kaum ibu di Kampung Kuler sehingga dapat membawa keterampilan yang dihasilkan untuk dijual.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu gerakan pemberdayaan yang berupaya untuk memandirikan masyarakat dimana yang berperan adalah perempuan dalam hal ini kaum ibu sebagai motor penggerakannya, dan pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 juga termuat di dalamnya salah satu tujuan utama PKK yaitu untuk mewujudkan keluarga yang mandiri. Dalam mewujudkan keluarga yang mandiri terutama dalam segi ekonomi dapat terlaksana melalui program keterampilan yang terdapat pada pokja II PKK, dimana program keterampilan ini sebagai upaya dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu dilakukannya penelitian di Kampung Kuler terkait evaluasi pada program PKK dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga karena PKK Kampung Kuler telah melaksanakan berbagai macam program keterampilan berupa pelatihan, dan berikut beberapa indikator digunakan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarianto (2017) menjelaskan bahwa masyarakat mengalami perubahan dengan dapat menggali kemampuan-kemampuan yang dimiliki, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta adanya kemandirian untuk membangun usaha dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini karena bukan hanya pelatihan yang diberikan melainkan penyuluhan serta pendampingan dalam pengembangan usaha dan adanya bantuan dalam pemasaran. Selain Imelda Irin (2016) juga menjelaskan bahwa tanggung jawab antar individu maupun kelompok, motivasi, kerjasama kelompok yang kompak, serta fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung pemberdayaan ekonomi PKK.

Berbagai kendala yang ditemui pada PKK Kampung Kuler dalam melaksanakan program keterampilan berupa pelatihan serta pemaparan dari hasil penelitian terdahulu yang ada keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan, inisiatif dan kerjasama melanjutkan sendiri atau bersama-sama keterampilan yang diperoleh, pengawasan serta pendampingan secara rutin berkelanjutan dan faktor lainnya yang dapat mendukung keberlanjutan usaha keterampilan dilakukan guna mendatangkan penghasilan tambahan dalam keluarga melalui

pendapatan yang diperoleh kaum ibu di Kampung Kuler sangat diperlukan sehingga tujuan dari dilaksanakannya berbagai pelatihan keterampilan untuk kemandirian ekonomi keluarga dapat terwujud sebagaimana mestinya, untuk perlu ada terobasan bersama secara sinergis antara masyarakat bersama pemerintah. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji suatu kejadian atau fenomena, objek ataupun proses, serta orang atau subjek berkaitan tentang Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Kemandirian Keluarga Di Kampung Kuler Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Basrowi dan Suwandi, 2008). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data digunakan menurut Miles dan Huberman Sugiyono (Sugiyono, 2011) dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dahniar (Rodiah dkk, 2016) PKK adalah suatu komunitas masyarakat dalam melaksanakan tindakan atau gerakan yang hadir karena adanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kelompok PKK terdiri dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan juga di dalamnya terdapat kelompok kerja atau yang disebut dengan pokja. Adapun misi dari PKK, adalah guna untuk belajar hidup berencana dalam setiap dimensi kehidupan dan merencanakan kehidupan ekonomi keluarga dengan cara belajar menabung, meningkatkan standar hidup sehat, serta melestarikan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Anonim (Ansari dkk, 2018) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), adalah tindakan atau gerakan pembangunan nasional dalam masyarakat yang lahir serta pengelolaannya dari rakyat, oleh rakyat juga untuk rakyat dengan kaum perempuan sebagai penggerak utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera, bahagia, mandiri dan maju. Selain itu, PKK juga adalah salah satu rekan dari organisasi masyarakat yang berperan menjadi fasilitator. Oleh karenanya setiap pelaksanaan program perlu dilakukan evaluasi secara mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah program.

Wirawan (2011) mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan guna untuk mengkaji, mengumpulkan serta menyajikan data ataupun informasi yang memberi manfaat tentang suatu objek evaluasi, berikutnya membandingkan dan menilai dengan indikator evaluasi dan hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tentang objek evaluasi. Kemudian dijelaskan lagi mengenai evaluasi program adalah suatu metode sistematis guna untuk menganalisis dan mengumpulkan serta menggunakan informasi atau data yang ada dalam menjawab pertanyaan dasar, sedangkan program adalah aktivitas / kegiatan dibuat guna untuk melakukan kebijakan dan dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang sangat penting juga perlu dilakukan untuk menilai maupun meneliti pada layanan suatu program atau kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan, dan sasaran populasi program atau kegiatan sudah terlaksana serta sesuai dengan yang ditentukan telah dilayani. Donaldson, dkk (Wirawan, 2011) menjelaskan proses program adalah aktivitas, kejadian-kejadian dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program yang disebut juga intervensi atau perlakuan program. Maka evaluasi proses yang dimaksud adalah kejadian-kejadian atau tindakan yang dilakukan pada suatu program atau kegiatan yang akan berlangsung, sedang berlangsung maupun telah berlangsung.

Dalam proses keberlangsungannya program keterampilan dalam bentuk pelatihan PKK Kampung Kuler sebelum dilaksanakan telah melalui tahap perencanaan/penyusunan serta adanya pengawasan yang dilakukan. Pada tiap tahapan tersebut keterlibatan atau partisipasi sangat diperlukan tidak saja dari pemerintah kampung melainkan dari pengurus juga masyarakat dalam hal ini yang dimaksud yaitu kaum ibu, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sumarto (2009) bahwa partisipasi merupakan proses ketika warga, baik diposisikan sebagai individu, kelompok sosial maupun organisasi, turut serta dalam pengambilan peran yang berpengaruh pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan suatu kebijakan atau keputusan yang berimplikasi pada kehidupan warga. Oleh sebab itu dengan adanya kehadiran peran serta keterlibatan atau partisipasi dari berbagai pihak yang ada terhadap proses penyelenggaraan program keterampilan PKK yang dilaksanakan berupa pelatihan keterampilan dapat berjalan dengan baik.

Selain keterlibatan atau partisipasi yang diperlukan suatu kegiatan atau program pemberdayaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kedepan dapat membantu kaum ibu mengatasi kesulitan atau kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan, sesuai pendapat dari Maryani dan Roselin (2019) menjelaskan mengenai prinsip berkelanjutan dimana bahwa kegiatan atau program pemberdayaan perlu dirancang agar dapat berkelanjutan maka secara bertahap akan mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman serta keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam pemberdayaan sehingga masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Berdasarkan hasil wawancara terkait evaluasi proses peneliti menemukan bahwa program keterampilan pada PKK Kampung Kuler sudah dilaksanakan berupa pelatihan akan tetapi kurang maksimal. Dalam merencanakan kegiatan dilakukan oleh ketua PKK bersama pemerintah kampung belum semua kaum ibu terlibat, begitupun saat pelaksanaan kegiatan dari 147 orang sekitar kurang lebih 25 orang yang terlibat ini karena kurangnya kesadaran, tanggung jawab serta komitmen bersama. Untuk pelaksanaannya kegiatan pelatihan keterampilan lebih banyak mendatangkan narasumber atau yang memberi pelatihan dari luar kampung karena kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pemerintah kampung maupun kaum ibu serta belum adanya pendampingan pelatihan keterampilan langsung dari PKK distrik maupun kabupaten. Untuk pengawasan dilakukan oleh

pemerintah kampung dengan menghadiri sekaligus mendampingi serta memantau / mengawasi tetapi hanya selama pelatihan berlangsung dalam waktu 1 hingga 3 hari.

Sehubungan dengan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan dari pengurus maupun masyarakat dalam hal ini yaitu kaum ibu masih rendah sehingga banyak yang belum terlibat oleh sebab itu perlu adanya pemberian sosialisasi atau penyuluhan dan pembinaan sehingga kedepan munculnya kesadaran, tanggung jawab serta komitmen bersama untuk terlibat dalam pelatihan maupun keberlanjutan setelah selesai pelatihan diberikan. Peran pemerintah kampung dalam melakukan pengawasan serta pendampingan dalam kegiatanpun sangat diperlukan dimana keterlibatan pemerintah kampung ini sebaiknya tidak hanya selama proses kegiatan pelatihan keterampilan berlangsung tetapi juga setelah pelatihan selesai sehingga ada keberlanjutan dari kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama.

Senada pendapat dari Burhanuddina, dan Bernardus Seran Kehik (2018) mengatakan bahwa pemerintah dalam era reformasi dan Otonomi Daerah diposisikan sebagai fasilitator atau pihak yang mempercepat dan memperlancar proses agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah maupun pemerintah desa bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi Manfaat (*Outcome Evaluation*)

Evaluasi manfaat merupakan salah satu evaluasi maupun langkah atau tahapan selanjutnya yang diperlukan setelah melakukan evaluasi proses pada program atau kegiatan yang sedang atau telah terlaksana. Evaluasi manfaat ini guna untuk menilai, menentukan maupun meneliti suatu program atau kegiatan yang ada telah memperoleh perubahan yang diinginkan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perilaku, keterampilan, pengetahuan maupun status (Donaldson dkk dalam Wirawan, 2011). Maka evaluasi manfaat dapat dijelaskan adalah suatu hal yang dilakukan untuk memberikan maupun memperoleh informasi terkait perubahan atau manfaat yang diharapkan dari program atau kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait evaluasi manfaat peneliti menemukan bahwa program keterampilan berupa pelatihan di Kampung Kuler telah dilaksanakan diantaranya membuat tas dari tali kur, kue, keripik pisang, piring lidi, bunga hias dari pelastik, taplak dan keranjang dari pembungkus fresco. Dari berbagai jenis kegiatan pelatihan yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi kaum ibu, sesuai dengan penjelasan manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2005) bahwa manfaat memiliki arti yakni guna atau faedah. Manfaat pertama secara ekonomi yakni dapat memberikan pendapatan bagi kaum ibu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Manfaat kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mewujudkan nilai kreativitas dan produktifitas salah satunya dalam hal memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada disekitar Kampung Kuler. Kekayaan potensi alam dapat diolah dan dikembangkan secara masimal dapat menambah sumber penghasilan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu upaya untuk membangun sumber daya

masyarakat sebagai cara untuk mendorong, memberi motivasi, serta memberikan kesadaran terhadap potensi ekonomi yang ada dan mampu memanfaatkan upaya dalam pengembangannya (Destri Rahmawati, 2019).

Namun hasil keterampilan belum dirasakan semua kaum ibu di Kampung Kuler dapat dilihat rendahnya keterlibatan karena kurang adanya kesadaran untuk terlibat, inisiatif dan tingkat kerja sama yang masih rendah untuk melanjutkan keterampilan yang diperoleh sehingga keberlanjutan setelah selesainya kegiatan dibuat perorangan hanya saat kegiatan pelatihan berlangsung dilakukan secara bersama-sama, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah kampung untuk terus melanjutkan keterampilan belum ada. Senada pendapat dari Burhanuddina, dan Bernardus Seran Kehikb (2018) mengatakan bahwa pemerintah dalam era reformasi dan Otonomi Daerah diposisikan sebagai fasilitator atau pihak yang mempercepat dan memperlancar proses agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah maupun pemerintah desa bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat

Sehubungan dengan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa program atau kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan guna untuk menambah pengetahuan keterampilan serta memberikan pendapatan sendiri bagi kaum ibu sehingga adanya penghasilan tambahan dalam keluarga masih kurang maksimal. Oleh sebab itu diperlukannya peran serta berbagai pihak dimana adanya keterlibatan kaum ibu dalam kegiatan, inisiatif dalam melanjutkan sendiri keterampilan yang diterima, kerjasama diantara kaum ibu dalam keberlanjutan keterampilan secara bersama-sama juga disertai pendampingan yang rutin dan berkelanjutan dari pemerintah kampung bagi kaum ibu sampai dapat memperoleh pendapatan sendiri sehingga ada penghasilan tambahan dalam keluarga.

Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*)

Evaluasi akibat merupakan salah satu jenis evaluasi maupun langkah atau tahapan terakhir pada suatu kegiatan atau program yang juga sangat penting dan perlu dilakukan setelah evaluasi manfaat dan evaluasi proses. Evaluasi akibat ini dilakukan guna untuk mengetahui atau melihat perbedaan yang diberikan pada saat sebelum dan setelah suatu kegiatan atau program itu dilakukan. Akibat dapat juga diartikan sebagai dampak atau pengaruh. Maka evaluasi akibat dapat dijelaskan bahwa suatu hal yang dilakukan guna untuk melihat atau mengetahui dari dampak atau pengaruh yang diberikan dapat menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan atau program itu dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait evaluasi akibat peneliti menemukan bahwa adanya perbedaan pada kehidupan kaum ibu sebelum dan setelah program keterampilan dalam bentuk pelatihan diberikan. Pertama peningkatan ekonomi, tadinya kaum ibu belum mampu memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan, sekarang membantu peran suami sebagai pencari nafkah meskipun penghasilan yang diperoleh hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan minum tetapi sudah cukup membantu. Kedua, kaum ibu sebelumnya minim pengetahuan dan keterampilan, sekarang memiliki tingkat

pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dapat membuat berbagai keterampilan untuk digunakan sendiri maupun untuk dijual. Ketiga terkait sikap, kaum ibu yang sebelumnya bergantung hanya dari penghasilan suami atau orang terdekat dalam memenuhi kebutuhan, sekarang berupaya mendapatkan penghasilan sendiri melalui usaha keterampilan walaupun dibuat dan dijual jika ada pesanan-pesanan yang datang. Namun belum semua kaum ibu mengalami perbedaan ini karena rendahnya keterlibatan, inisiatif dan kerjasama masih rendah, belum ada pendampingan berkelanjutan, belum ada tempat khusus untuk membawa atau menitip jualan, kondisi jalan yang kurang bagus, jaringan komunikasi belum memadai, dan belum ada kehadiran koperasi yang diwadahi oleh PKK atau pemerintah kampung.

Sehubungan dengan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa program keterampilan dalam bentuk pelatihan dimana untuk memberikan perbedaan pada kehidupan kaum ibu sebelum dan sesudah kegiatan diberikan masih kurang maksimal. Oleh sebab itu selain adanya keterlibatan dalam kegiatan, inisiatif dan kerjasama meneruskan sendiri maupun secara bersama-sama keterampilan yang diperoleh, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah kampung perlu juga faktor pendukung lainnya seperti akses jalan menuju ke kota yang mendukung, jaringan komunikasi yang memadai, ditunjang dengan adanya kehadiran koperasi, serta tempat khusus yang disediakan agar kaum ibu dapat membawa dan menjual hasil keterampilan yang mereka buat hal ini perlu mendapat perhatian tidak saja dari pemerintah kampung tetapi juga dari distrik serta pemerintah pusat (kabupaten) melalui PKK distrik dan kabupaten .

Proses keterlibatan masyarakat secara sadar dalam menjalankan sebuah program menjadi modal dasar dalam membangun rasa salodartas baik antar individu, antar kelompok maupun dengan masyarakat secara luas, dengan kesadaran secara kolektif akan melatih masyarakat untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain dan juga akan membangun rasa tanggung jawab dalam melaksanakan suatu program. Selanjutnya pendapat dari Wadu et al., (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan perlu semangat dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk kesejahteraan dari program PKK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga di Kampung Kuler terkait program keterampilan berupa pelatihan yang dilaksanakan kurang maksimal dikarenakan rendahnya kesadaran, tanggung jawab serta komitmen untuk terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, inisiatif dan kerjasama melanjutkan sendiri maupun bersama-sama masih rendah, pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah kampung belum ada, selain itu juga adanya kesulitan memasarkan usaha keterampilan, akses jalan dan jaringan komunikasi belum mendukung serta belum ada kehadiran koperasi. Dapat dilihat dari indikator evaluasi proses dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum semua kaum ibu terlibat, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah kampung dilakukan hanya selama waktu pelatihan berlangsung. Pada indikator evaluasi manfaat, sudah memberikan penghasilan juga dapat menambah pengetahuan serta keterampilan, tetapi belum semua kaum ibu merasakannya. Kemudian indikator evaluasi akibat, kaum ibu kini bisa membantu suami mencari nafkah,

tidak terus berharap pada bantuan orang terdekat untuk memenuhi kebutuhan, memiliki pengetahuan dan keterampilan juga memiliki penghasilan sendiri meskipun hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok tetapi belum semua mengalaminya.

Saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terkait program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga: Perlu adanya sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan langsung yang diberikan oleh pemerintah kampung, PKK distrik, PKK kabupaten maupun pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, komitmen serta kerjasama dari pengurus untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan serta keberlanjutan setelah kegiatan pelatihan keterampilan diberikan, Perlu adanya menyediakan tempat khusus maupun membangun jaringan dengan pihak luar atau pelaku-pelaku usaha UMKM yang berada di kota Merauke agar dapat memasarkan berbagai hasil usaha keterampilan kaum ibu yang berada di Kampung Kuler. Perlu ditingkatkan lagi / dioptimalkan lagi badan atau dibentuk koperasi di kampung yang dikelola atau diwadahi sendiri oleh PKK kampung maupun pemerintah kampung dengan tujuan agar usaha keterampilan yang dibuat oleh kaum ibu ini dapat tetap berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari Fitriyanti, Aji Ratna Kusuma & Santi Rande. (2018). Peran PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. *Ejournal Administrasi Negara*, 6(3), 7896–7910.
- Armandika, S. A. (2017). Hubungan Peran Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-Hari Di Desa Ng Udirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Baswori & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddina, dan Bernardus Seran Kehik (2018). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan (Studi Kasus di Desa Oenenu Utara Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Volume 3 No 2 Tahun 2018
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 79–91. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34>
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123–135
- Jenoardi Meleru; Fanley Pangemanan; Stefanus Sampe, (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Talorane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe . *Jurnal Governance* Volume.2, No. 1 Tahun 2022

- Pusposari Luthfiya Fathi, Umamah, dkk. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Berorientasi Kemandirian (Studi Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). *J-PIPS*, 2(1), 42-62.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- Rodiah, Lusiana, & Agustine. (2016). Pemberdayaan Kader PKK Dalam Usaha Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jatinangor. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*.
- Sugiyono, P. D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi Pemberdayaan Pendidikan Melalui 10 Program Pokok PKK. *Journal Public Service and Governance*, Volume 1 No 2 Tahun 2020,
- Sri Devfa 1, Nellis Mardhiah. (2022). Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 8, No 1 Tahun 2022
- Tim Penggerak Pkk Pusat. (2015). *Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Pkk Ke Viii Tahun 2015*. Jakarta : Tim Penggerak PKK Pusat.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *JIP*, 8(1), 62–71.